

Cultural Economic Spectrum Of Village Credit In Bali (Case Study LPD Of Penglatan Village, Buleleng District)

Spektrum Ekonomi Budaya Lembaga Perkreditan Desa Di Bali (Studi LPD Desa Penglatan Kecamatan Buleleng)

I Gusti Made Dharma Hartawan

dharmahartawan74@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai modal sosial, *Tri Hita Karana* masih relevan sebagai sarana penilai sekaligus sebagai sarana penghukum yang kompatibel bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Dikatakan demikian karena *Tri Hita Karana* bersifat laten yang dibungkus oleh budaya dalam menggerakkan sumber daya ekonomi. Pendekatan kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan kuantitatif. Kajian bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi *Tri Hita Karana* dalam pembangunan di Desa Penglatan Kabupaten Buleleng Bali. Hasil menunjukkan bahwa *Tri Hita Karana* sebagai modal sosial sangat mengakar dalam menggerakkan aktivitas warga desa. Sisi lain, rata-rata 20% keuntungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) per tahunnya diperuntukkan bagi pembangunan desa. Bentuknya beragam seperti pembangunan Balai Desa, perbaikan tempat ibadah bagi umat Hindu di mana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) itu bermukim. Dengan kata lain *Tri Hita Karana* sebagai institusi sosial sanggup meningkatkan kemakmuran desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebermanfaatan bersama secara ekonomi dengan cara menjaga hubungan antara manusia, lingkungan dan Tuhan secara harmoni.

Kata kunci : modal sosial, *Tri Hita Karana*, Lembaga Perkreditan Desa

ABSTRACT

As social capital, *Tri Hita Karana* is still relevant as an assessment tool as well as a compatible punishment tool for Village Credit Institutions (LPD) in Bali. It is said that because *Tri Hita Karana* is latent, wrapped up in culture in mobilizing economic resources. This study approach uses a qualitative descriptive method combined with a quantitative approach. The study aims to find out and understand how *Tri Hita Karana* is implemented in development in Penglatan Village, Buleleng Regency, Bali. The results show that *Tri Hita Karana* as social capital is deeply rooted in driving the activities of village residents. On the other hand, an average of 20% of Village Credit Institution (LPD) profits per year are allocated for village development. It takes various forms, such as building a Village Hall, improving places of worship for Hindus where the Village Credit Institution (LPD) resides. In other words, *Tri Hita Karana* as a social institution is able to increase village prosperity by upholding the values of mutual economic benefit by maintaining the relationship between humans, the environment and God in harmony.

Keywords : social capital, *Tri Hita Karana*, Village Credit Institutions

1. Pendahuluan

Sebagai tiga sumber kemakmuran di Bali, *Tri Hita Karana* (selaras di antara manusia, lingkungan, dan Tuhan) dengan harmoni sebagai cirinya sangat mengakar digunakan dalam mengurangi ketidakpastian dalam berekonomi (Peter, 2015). Dengan begitu dapat dikatakan, *Tri Hita Karana* telah menjadi panduan bersama dalam mengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Ini penting karena keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Penglatan Kecamatan Buleleng merupakan lembaga keuangan milik warga desa.

Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara dengan Bapak Made Astawa bagian Tata Usaha LPD Penglatan yang mengatakan sumbangsih LPD bagi Desa Penglatan tercermin dari kinerja keuangan berbasis Budaya *Tri Hita Karana*. Misal untuk menjaga hubungan baik dengan Tuhan (*parahyangan*), 20% dari laba LPD peruntukkannya untuk pembagunan pura yang sepenuhnya dikelola oleh Desa adat Penglatan. Selanjutnya dalam konsep hubungan antar manusia (*pawongan*), LPD berkontribusi mendistribusikan 10% labanya untuk kemakmuran pegawainya. Untuk *palemahan* (hubungan dengan lingkungan) LPD mengalokasikan dana 5% untuk modal sosial dengan wujud pelaksanaan *manusa yadnya* (upacara terkait lingkungan) sebagai bentuk tanggungjawab sosial LPD kepada lingkungan. Ini dilakukan agar LPD senantiasa berusaha dan berupaya memelihara lingkungan yang bersih, rapi dan asri yang

sanggup menimbulkan rasa tenang dan tentram dalam diri karyawan dan warga desa sehingga pelayanan kepada warga menjadi optimal. Fenomena tersebut menguatkan bahwa bahwa *Tri Hita Karana* sanggup menciptakan budaya kejujuran (Anantawikrama, 2014), keterbukaan, dan akurat yang sanggup memberikan aliran modal bagi pembangunan desa (Dwirandra, 2012).

2. Tinjauan Pustaka

Buku ekonomi Hindu (Hartawan, dkk., 2019) menyatakan orientasi masyarakat Hindu yang bermukim di Bali berpijak pada *dresta* yang dimaknai sebagai tata krama dalam menjalankan hidup yang disesuaikan dengan *desa kala patra* (tempat, waktu, dan keadaan). Sebab itu nilai-nilai kearifan lokal di mana manusia itu lahir, hidup, dan bermukim berpotensi sebagai instrumen dalam mengelola sumber daya yang sanggup mengurangi ketidakpastian dalam berekonomi (North, 1991; Williamson, 2000). Hartawan, dkk., (2023) menyebutkan ada empat spektrum ekonomi budaya yang diurai sebagai berikut.

Pertama, nilai sumber daya yang kerap dihadapkan dengan besaran harga dan biaya yang berbeda-beda. Karena itu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) selalu ditantang dalam memproduksi nilai sumber daya yang optimal. Dapat diartikan jumlah sumber daya relatif terbatas bila dibandingkan dengan yang diminta dengan dua indikator, yaitu: harga dan biaya relatif sumber daya (Sugiyanto dan Fikri, 2016).

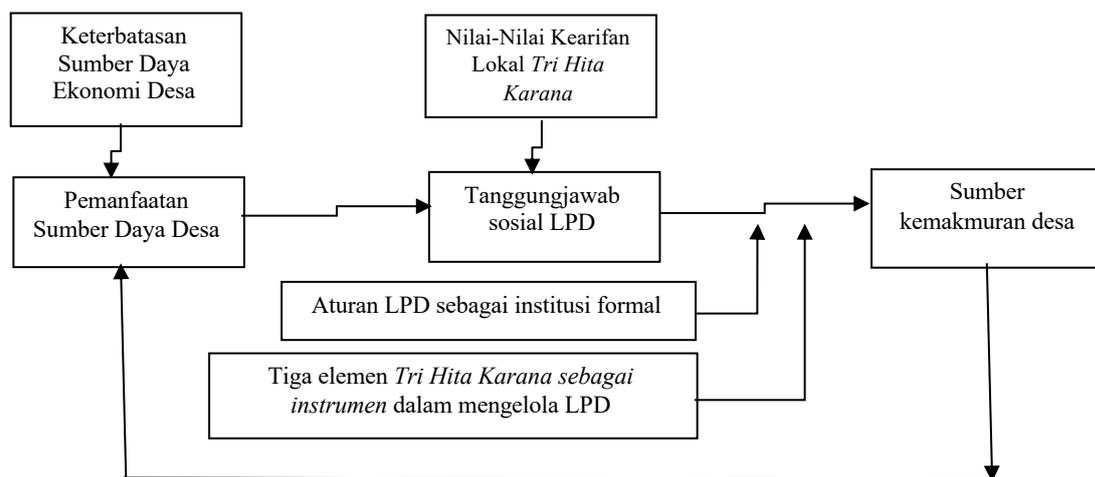
Kedua, inovasi sebagai substitusi yang cerdas bagi keberlangsungan nilai ekonomi dan sosial. Caranya dengan menaikkan nilai ekonomi dari ekonomi agraris menuju ekonomi barang dan jasa yang berujung pada *experience economy* (Pine dan Gilmore, 1998).

Ketiga, dalam berekonomi, umat Hindu di Bali berpijak pada *dresta* yang dimaknai sebagai tata krama dalam menjalankan hidup yang disesuaikan dengan *desa kala patra* (tempat, waktu dan keadaan) (Sudiana, dkk., 2016). Sebab itu nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat berfungsi sebagai instrumen ekonomi (Ismail, dkk., 2014). Ada empat *dresta* (*catur dresta*), yakni *sastra dresta* yang berpijak pada nilai-nilai *Tri Hita Karana* yang disematkan ke dalam rangkaian upacara keagamaan (*kuna dresta*) yang dikuatkan oleh pandangan hidup bersama sebagai entitas Bali karena memberi manfaat bersama (*loka dresta*) yang tunduk kepada *tata lungguh* (aturan main) dalam berekonomi (*desa dresta*). Secara teoritis *catur dresta* masuk kategori modal sosial yang didefinisikan Putnam (1995) sebagai modal sosial memiliki jaringan, norma dan kepercayaan yang memudahkan warga dalam berkoordinasi dan bekerjasama guna memperoleh manfaat bersama. Sedangkan Fukuyama (1995) berpendapat modal sosial menjadi makin kuat bila berlaku norma saling balas membantu dan kerjasama. *Tri Hita Karana* sebagai tiga sumber kemakmuran (Peter, 2015) mencakup tiga elemen, yakni aktivitas ekonomi harus selaras dengan manusia, lingkungan dan sang pencipta.

Keempat, ketahanan ekonomi berpola budaya sebagai mekanisme pertahanan diri agar tidak tercerabut dari akar budaya setempat. Secara teori hal ini menguatkan ekonomi inklusi yang lahir dari bawah. Yusgiantoro (2014) mendefinisikan ketahanan ekonomi sebagai kondisi ekonomi dalam menghadapi hambatan, gangguan, tantangan, dan ancaman sebagai suatu kemampuan dalam memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis guna mewujudkan kemakmuran bersama yang diukur dengan penguatan aktivitas ekonomi dalam menggunakan sumber daya sebagai bentuk pertahanan ekonomi yang kokoh.

3. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi *Tri Hita Karana* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Penglatan Kecamatan Buleleng Provinsi Bali maka kerangka konsep penelitian disuguhkan sebagai berikut.



Gambar 1
Kerangka Konsep Spektrum Ekonomi Budaya Lembaga Perkreditan Desa

Konsep penelitian diawali dari keadaan warga Desa Penglatan yang dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya ekonomi. Keadaan ini menyadarkan warga untuk senantiasa berusaha dan berupaya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Membuka Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan langkah maju dalam membangun ekonomi desa. Agar pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak terasing dengan budaya masyarakat setempat, maka nilai-nilai *Tri Hita Karana* dipilih dan disematkan sebagai konsep pengelolaan dan pemanfaatan LPD bagi kesejahteraan bersama. Sebagai bentuk tanggungjawab sosial tentu pilihan ini tunduk kepada aturan main LPD secara formal yang dikuatkan oleh pendekatan budaya sebagai aturan main secara informal.

Agar implementasi *Tri Hita Karana* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tetap berada dalam kaidah ilmiah, maka pendekatan kajian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan kuantitatif. Elaborasi di antara keduanya dikuatkan dengan teori ekonomi budaya yang dilengkapi oleh teori yang menguatkan temuan penelitian. Tentu kelayakan informasi yang bersumber dari para informan kunci menjadi sangat penting. Untuk itu penentuan informan kunci ditentukan dengan metode *purposive sampling*, yakni informan adalah seseorang yang memiliki informasi akurat terkait kajian yang diteliti seperti Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Penglatan, kepala Desa Penglatan, dan tokoh masyarakat.

4. Hasil dan Pembahasan

Sebagai sarana penilai yang kompatibel bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Penglatan Kecamatan Buleleng, spektrum ekonomi budaya menekankan pada pentingnya distribusi pendapatan berkeadilan berbasis *Tri Hita Karana* (wawancara; Made Astawa selaku Tata Usaha LPD Penglatan dan Wayan Susila selaku tokoh masyarakat, 2024). Pernyataan ini sinkron dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Bali No. 3 tahun 2007 di mana fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai wadah kekayaan desa dan pengelolaannya diarahkan kepada usaha-usaha peningkatan taraf hidup warga desa untuk menunjang pembangunan desa adat di mana LPD itu bermukim. Detailnya dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, *Tri Hita Karana* menuntun nilai sumber daya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Penglatan diarahkan untuk perbaikan maupun pembangunan tempat suci. Rata-rata peningkatan dana tanggungjawab sosial sebesar 10% per tahunnya. Hal ini sangat membantu warga, mengapa? Karena awalnya masyarakat dikenakan iuran untuk perbaikan maupun pembangunan tempat suci, kini warga terbantuan oleh aliran modal dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dapat dikatakan, *Tri Hita Karana* merawat hubungan sosial antara manusia dengan lingkungan dan sang pencipta. Artinya makin tinggi nilai sumber daya yang diproduksi oleh

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) maka implementasi *Tri Hita Karana* makin mengakar. Dengan kata lain, nilai sumber daya memperkuat implementasi *Tri Hita Karana*.

Kedua, *Tri Hita Karana* memperkuat inovasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) seperti ikut serta di dalam pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Penglatan. Keterlibatannya sebagian besar secara *non-financial*, yakni memberikan gagasan dan memfasilitasi pelatihan manajemen. Untuk keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) warga Desa Penglatan yang sebagian besar bergerak bidang produksi Dodol, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) membantu bidang *financial*. Jadi inovasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat dikatakan berperan sebagai patron-klien bagi bertumbuhkembangnya UMK Desa Penglatan. Artinya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dipercaya penuh oleh warga sebagai bantalan usaha ke arah yang lebih baik.

Ketiga, *Tri Hita Karana* sebagai modal sosial disematkan ke dalam rangkaian upacara keagamaan. Sebagai aturan main informal, nilai-nilai *Tri Hita Karana* diendapkan dan disalurkan melalui ritual, pentas budaya, seperti tarian, gambelan dan seni budaya lainnya. Ini dilakukan agar nilai-nilai *Tri Hita Karana* membumi di masyarakat. Penguatan nilai-nilai *Tri Hita Karana* diikat oleh adat dan tradisi berupa *awig-awig* (aturan main). Artinya konsep *Tri Hita Karana* mbingkai setiap aktivitas warga dalam berekonomi yang dikuatkan oleh pandangan bersama sebagai entitas Hindu. Hal ini diyakini memperkuat keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai penggerak roda perekonomian.

Keempat, *Tri Hita Karana* sebagai mekanisme pertahanan diri dalam berekonomi. Ini dilakukan untuk meredam dan mengantisipasi pengaruh luar yang berefek negatif bagi warga desa. Misal, *awig-awig* dilarang berburu burung dan membuang sampah ke sungai. Dengan kata lain, *Tri Hita Karana* bertugas menjaga lingkungan agar tetap asri dan mencengah tergerusnya nilai-nilai budaya yang telah turun temurun diwarisi oleh leluhur. Pendeknya *Tri Hita Karana* sanggup mengurangi ketidakpastian dalam berekonomi.

Keseluruhan penjelasan spektrum ekonomi budaya di atas mengindikasikan bahwa *Tri Hita Karana* berfungsi sebagai sistem tata kelola dan tata laksana yang bertugas mengurangi ketidakpastian dalam berekonomi yang berbasis kepada kemakmuran bersama.

5. Penutup

Kesimpulannya, *Tri Hita Karana* sebagai sistem tata kelola dan tata laksana bersifat laten yang menuntun setiap aktivitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memproduksi nilai sumber daya dengan cara merangkul pandangan hidup bersama yang berpijak pada hubungan antara manusia, lingkungan dan Tuhan dengan harmoni sebagai cirinya. Oleh karena itu spektrum ekonomi budaya layak dikatakan sebagai sarana penilai yang kompatibel bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berorientasi kepada kemakmuran bersama.

Sebagai lembaga keuangan desa tentu kiprah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mendapat sorotan tajam bagi kalangan kampus untuk diteliti lebih baik dan lebih dalam lagi. Untuk itu kajian spektrum ekonomi budaya sebagai instrumen penilai penting digodok dan di uji kembali dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Anantawikrama, T. A. 2012. "Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Kajian Kritis di Desa Pakraman Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, Bali)". Disertasi, Program Doktor Ilmu Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Dwirandra, A.A.N.B. 2012. "Rekonstruksi Metoda Penilaian Aset dengan Filosofi Tri Hita Karana". Disertasi Program Doktor Ilmu Akuntansi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.

- Fukuyama, F. 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. London: Hamish Hamilton. *Stren Bussiness Magazine*. Vol: 4. No.1.
- Hartawan, I Gusti Made Dharma, Murjana Yasa, Suryadinatha Gorda, Supriyadinata Gorda, 2019. *Ekonomi Hindu: Catur Dresta Ide Pengatur Ketahanan Ekonomi Budaya*. Nilacakra, Bali.
- Hartawan, I Gusti Made Dharma, Suryadinatha Gorda, Sri Kasih, Ni Luh 2023. *Ekonomi Budaya: Ketahanan Ekonomi Desa Bali Aga*. Nilacakra.
- Ismail, Munawar. Santosa, Budi. Yustika, Erani, Ahmad. 2014. *Sistem Ekonomi Indonesia. Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Erlangga.
- North, Douglas C. 1991. *Institutions. Journal of Economic Perspectives*. Vol: 5. Num. 1. Pages 97-112.
- Peter, Hendrick Jan. 2015. *Tri Hita Karana. The Uniqueness of Bali*. Udayana University Press.
- Pine, B. Joseph. Gilmore, James H. 1998. *The Experience Economy. Article*. Harvard business review.
- Putnam, R.D. 1995. *Turning In, Turning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America. Political Science and Politics* 28.
- Sudiana, I Gusti Ngurah. Windia, Wayan P. Relin, D.E. 2016. *Prajuru Desa Pakraman Rohaniawan Hindu dan Hukum*. Bali: Swasta Nulus.
- Sugiyanto, Catur. Fikri, Saiful, Hafidh, Ahmad, Aula. 2016. *Ekonomi Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Williamson, Oliver E. 2000. *The New Institutional Economics. Jurnal of Economic Literature*. Vol: 38. No.3.pp 595-613.
- Yusgiantoro, Purnomo. 2014. *Ekonomi Pertahanan. Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.